

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan berkaitan dengan masa depan bangsa. Kemajuan yang dicapai suatu bangsa ditentukan oleh sistem pendidikannya yang berfungsi dengan baik. Sebaliknya keterbelakangan atau kemunduran suatu bangsa diakibatkan oleh sistem pendidikan yang tidak berjalan dengan baik atau tidak efektif. Karena pendidikan merupakan proses pembinaan potensi dan transformasi budaya dalam rangka eksistensi masa depan bangsa, maka pengelolaan seluruh aspeknya harus terarah, terencana dan terpadu secara sistemik. Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan<sup>1</sup>. Pendidikan pula yang merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, material dan spiritual.

Proses pemindahan nilai-nilai pada berbagai aspek kehidupan dilakukan melalui pendidikan, dari generasi ke generasi berikutnya yang berlangsung sejak zaman dahulu sampai sekarang. Karena pendidikan merupakan proses, maka pendidikan selalu diperlukan oleh manusia dalam rangka perubahan untuk pencapaian tujuan yang ideal bagi kehidupan manusia.

---

<sup>1</sup> M.Ngalim Poerwanto, *Ilmu Pendidikan dan Praktis*, (Bandung:Remaja Roesda Karya, 2000), cet. Ke-12, h.10

Selanjutnya dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dinyatakan:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>2</sup>.

Berdasarkan undang-undang diatas jelaslah bahwa tiap warga negara atau setiap individu berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Sedangkan yang menjadi pelaksana dan penanggungjawab pendidikan adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah (pendidikan merupakan tanggungjawab bersama seluruh aspek masyarakat).

Pembukaan UUD 1945 pasal 4 juga menyatakan bahwa pembentukan Negara Indonesia diantaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti membangun bangsa yang berkarakter kuat dan berperadaban tinggi. Pendidikan merupakan sarana yang amat penting untuk membangun kultur, UU SISDIKNAS NO 20 tahun 2003 menjelaskan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Citra Umbara, 2006), h.7

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 8

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Hak warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu di Indonesia dilindungi dengan sejumlah undang-undang. Namun pada kenyataannya masih banyak masalah yang ditemui berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah banyak orang yang terabaikan dan terdiskriminasi dari partisipasi yang bermakna dalam masyarakat, seperti orang-orang miskin secara ekonomi, minoritas secara budaya/ bahasa dan berbeda keadaan karena menyandang kelainan atau kecacatan. Cara yang tepat untuk merespon tantangan pendidikan yang dihadapi saat ini adalah melalui pendidikan yang inklusif, karena pendidikan inklusif bukan sebuah model yang universal tetapi sebagai ideology atau filsofo yang harus memperhitungkan potensi, karakteristik, sumberdaya yang ada disetiap daerah atau dengan kata lain pendidikan inklusif merupakan model pendidikan yang mengakomodasi keberagaman kebutuhan lokal.<sup>4</sup>

Sekolah merupakan suatu wadah atau tempat bagi setiap anak belajar secara formal untuk mendapatkan layanan pendidikan sebagai bekal bagi mereka dalam menghadapi masa depannya. Setiap anak menginginkan mereka dapat diterima dan menjadi bagian dari komunitas sekolah baik itu di kelas, dengan guru, dan teman sebaya. Penerimaan yang baik dilingkungan sekolah akan

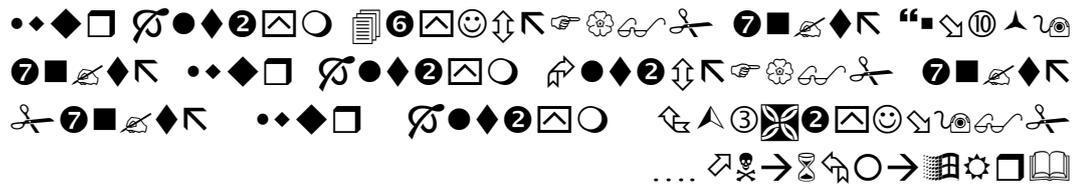
---

<sup>4</sup> Drs. Kustawan M.Pd, Budi Hermawan, S.Pd.M.Phil.SNE, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, (Jakarta : Luxima, 2013) h. 4

membantu anak untuk dapat bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih luas yakni dalam lingkungan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Dalam agama Islam tidak ada perbedaan hak belajar baik yang cacat atau yang normal. Semuanya berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, jadi hak setiap orang dalam mendapatkan ilmu adalah sama. Pada hakikatnya pendidikan antara anak normal dan tidak normal tentu sangat berbeda. Namun hal ini tidak menjadi masalah untuk meningkatkan mutu pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan, Allah SWT berfirman dalam Q.S.

An-Nur ayat 61 yaitu:



Berdasarkan sumber Alquran di atas dijelaskan bahwa anak yang mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan begitu juga dalam hal memperoleh pendidikan yang layak bagi mereka. Pemberian kecakapan dan pengetahuan kepada murid-murid merupakan proses pembelajaran (proses belajar mengajar) itu dilakukan oleh guru di sekolah dengan menggunakan cara-cara tertentu. Untuk mewujudkan harapan tersebut, guru dituntut untuk memiliki dan memahami pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal tersebut mempermudah dalam mendidik dan mengarahkan peserta didiknya.

Dewasa ini sebagian anak yang berkebutuhan khusus sudah ada yang mengikuti pendidikan di sekolah reguler, namun karena ketiadaan pelayan khusus bagi mereka, akibatnya mereka berpotensi tinggal kelas yang pada akhirnya akan

putus sekolah. Akibat lebih lanjut program wajib belajar pendidikan 9 tahun akan sulit tercapai. Untuk itu perlu dilakukan terobosan dengan memberikan kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler yang disebut dengan istilah “pendidikan terpadu menuju pendidikan inklusif”<sup>5</sup>

Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, termasuk didalamnya program percepatan (akselerasi) belajar filosofi yang berkenaan dengan hakekat manusia, hakekat pembangunan Nasional, tujuan pendidikan dan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kelemahan yang tampak dari penyelenggara pendidikan seperti ini adalah tidak terakomodasinya kebutuhan individual siswa di luar kelompok siswa normal.

Jenis anak berkebutuhan khusus saat ini semakin kompleks, dan semakin luas, karena tidak terbatas pada anak berkebutuhan khusus yang permanen saja. Pengelompokan anak berkebutuhan khusus sangat beragam, tergantung dari sudut mana pengelompokan dilakukan. Suatu jenis kelainan kadang-kadang dianggap merupakan bagian dari jenis kelainan yang lain, tetapi juga dimunculkan sebagai kategori sendiri. Beberapa jenis gangguan yang berkembang di masyarakat dan membutuhkan suatu layanan yang khusus yaitu anak gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, keterbelakangan mental, dengan gangguan fisik dan kesehatan, kesulitan belajar, lambat belajar, anak hiperaktif, anak dengan

---

<sup>5</sup> Drs. Kustawan M.Pd, Budi Hermawan,S.Pd.M.Phil.SNE, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, h. 6

kemampuan unggul, gangguan komunikasi, anak autis, anak-anak dengan kelainan majemuk.<sup>6</sup>

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (cacat) ke dalam program sekolah, untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah.

Sistem pendidikan inklusif merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun tatanan masyarakat inklusif (*inclusive society*). Sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan. Pemerintah melalui PP.No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menjelaskan pada pasal 41(1) telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Undang-undang tentang pendidikan inklusif dan bahkan uji coba pelaksanaan pendidikan inklusif pun telah dilakukan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Deden Kaswara, S.Pd. M.M.Pd, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autis*, (Bandung : Luxima, 2013) h. 9

<sup>7</sup> David Smith, *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), h. 45

Dengan diterimanya anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, orang tua merasa dihargai atau dapat meningkatkan penghargaan terhadap anak. Orang tua merasa senang ketika anaknya dapat bersosialisasi dengan baik tanpa ada diskriminasi dan akan lebih memahami cara memotivasi peningkatan belajar anaknya yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Orang tua mengetahui cara membimbing anaknya dengan lebih baik lagi, dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan dalam kegiatan belajar anaknya serta mendapat kesempatan untuk sharing dengan pihak sekolah dan *stakeholder* lainnya dalam merencanakan pembelajaran untuk anaknya yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya, kekuatannya, kelemahannya, permasalahan dan hambatan lainnya, serta senang ketika anaknya memiliki keterampilan sosial yang baik.<sup>8</sup>

Berjalannya sekolah inklusif memiliki beberapa kasus yang muncul misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusif, terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusif menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusif belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan.

Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan

---

<sup>8</sup> Drs. Kustawan M.Pd, Budi Hermawan, S.Pd.M.Phil.SNE, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, h. 63

seluruh siswanya, sementara disisi lain para guru tidak memiliki ketrampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel.

Pendidikan inklusif ini berbeda dengan pendidikan luar biasa. Jika pendidikan luar biasa hanya dikhususkan untuk anak yang memiliki keterbatasan kemampuan dan memiliki kurikulum yang jauh berbeda dengan sekolah umum, maka pendidikan inklusif ini tidak membeda-bedakan kurikulum. Lebih dari pada itu disable dapat berinteraksi dengan orang normal dan masyarakat luas, sehingga akan terbentuknya sikap toleransi yang tinggi dan saling menghargai terhadap disable bukan sebaliknya yang dianggap akan semakin parahnya pelecehan untuk ABK.<sup>9</sup>

Mengingat pernyataan di atas, sekolah inklusif merupakan sekolah yang harus memiliki strategi pembelajaran yang lebih variatif agar dapat menangani berbagai kemungkinan yang tidak biasa terjadi di sekolah pada umumnya. Begitu juga dengan sekolah inklusif yang proses pembelajarannya menggabungkan siswa normal dan anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus tersebut adalah mereka yang menyandang tuna netra, tuna rungu, autisme dan yang mempunyai keterbelakangan mental lainnya. Sekolah inklusif harus mampu memberikan pendidikan terhadap anak didiknya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa terutama terhadap siswa ABK, karena pada umumnya siswa ABK itu belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sekolah yang khusus diperuntukan bagi para siswa ABK. SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB

---

<sup>9</sup> Drs. Kustawan M.Pd, Budi Hermawan, S.Pd.M.Phil.SNE, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, h. 12

bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda.

Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Sampai saat ini pemerintah sudah menyediakan layanan sekolah inklusif di berbagai daerah mulai tingkat SD sampai dengan SMA. Sosialisasi sangat penting bagi ABK karena dengan begitu akan sangat membantu untuk kesembuhan mental dan menyiapkan diri supaya kelak bisa menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri dan berpotensi.

Tujuan pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Salah satu tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 2 tersebut adalah agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan (dalam hal ini sekolah inklusif) harus mengarah kepada tujuan pendidikan tersebut.

Pendidikan inklusif sebenarnya merupakan model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkelainan atau cacat dimana penyelenggaraannya dipadukan bersama anak normal dan tempatnya di sekolah umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga bersangkutan. Latar belakang munculnya pendidikan inklusif ini karena terbatasnya sekolah luar biasa (SLB) atau sekolah dasar luar biasa (SDLB) yang masih sangat terbatas jumlahnya dan sebatas tempat tertentu yaitu baru di tingkat Kecamatan, itupun milik swasta, sementara yang SLB Negeri berada di tingkat Kabupaten

Merujuk kepada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas dalam buku Panduan Manajemen Sekolah, bidang-bidang kegiatan pendidikan di sekolah mencakup manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan/dana, manajemen lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat), manajemen layanan khusus.<sup>10</sup>

Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh adanya pengelolaan pembelajaran yang baik khususnya pada sekolah inklusif agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai sehingga tidak terjadi adanya perbedaan antara siswa normal dengan siswa ABK. Untuk mewujudkan keinginan tersebut bukan hal yang mudah, peran kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan para guru sangat dituntut untuk mengembangkan potensi, kreatifitas dan inisiatif yang ada pada diri mereka untuk mengatasi dan menciptakan pendidikan bermutu

---

<sup>10</sup>Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional, h. 6-9.

dengan cara menerapkan manajemen pembelajaran yang ada dengan pengelolaan pembelajaran yang dapat diterima dan dipahami oleh seluruh peserta didik.<sup>11</sup>

Manifestasi manajemen bidang edukasi yang diadopsi ke dalam pengelolaan pembelajaran adalah perencanaan program pembelajaran (*planning*), pengorganisasian bahan ajar (*organizing*), pelaksanaan proses pembelajaran (*actuating*), pengalokasian waktu pembelajaran (*coordinating*), penilaian hasil pembelajaran (*controlling*).<sup>12</sup>

Jadi, pengelolaan pembelajaran merupakan penerapan manajemen dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan manajemen sumber daya manusia dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, pengelolaan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta bersungguh-sungguh, dan pembinaan secara kontinyu para pegawai sekolah, sehingga mereka dapat membantu dan menunjang kegiatan-kegiatan sekolah (khususnya PBM) secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Para personal harus ditata atau dikelola dengan baik agar senantiasa efektif dan bergairah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Saat ini yang menjadi kendala berkembangnya sekolah inklusif adalah dalam pengelolaan pembelajaran yang mencakup didalamnya tenaga kerja yang memiliki kapabilitas dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) masih dinilai kurang, untuk yang tunanetra, *low vision* atau tunarungu butuh

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>12</sup>Di adopsi dari: Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Hon Profit Bidang Pemerintahan dengan ilustrasi di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), h. 52-105.

tenaga khusus dan untuk saat ini pun masih minim. Masih sedikitnya jumlah sekolah inklusif dan lokasinya yang jauh agak menyulitkan para siswa ABK. Oleh karena itu, selain perlunya ditambah jumlah sekolah, guru pembimbing khusus bagi anak-anak tersebut supaya tidak ketinggalan dalam pembelajaran juga harus dipertimbangkan. Dengan demikian, pihak sekolah mampu mengidentifikasi para ABK dan memberikan perlakuan terbaik terhadap mereka.<sup>13</sup>

Pengaturan metode, strategi, dan kelengkapan dalam pengajaran adalah bagian dari kegiatan pengelolaan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Untuk mewujudkan pengelolaan pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya sekolah inklusif, lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat akan mendukung meningkatnya intensitas pembelajaran siswa dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran.<sup>14</sup> Guru yang terlibat di sekolah inklusif yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus.

Berdasarkan studi pendahuluan berupa kunjungan ke SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin yang berlokasi di jalan. Banua Anyar RT 18 No. 12 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, diperoleh informasi bahwa SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin pada mulanya merupakan sekolah dasar pada umumnya. Hingga pada tahun 2003 sekolah ini menerima 1 orang siswa dengan kebutuhan khusus, kemudian pada tahun 2005 SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin mulai

---

<sup>13</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013) h. 19

<sup>14</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan Uneversitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung : 2011) h. 103

mantap berdiri dan mulai mempublikasikan diri sebagai sekolah inklusif dan berkomitmen melayani siswa berkebutuhan khusus dengan menerima murid ABK.

Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya didapati anak dengan kebutuhan khusus yang beragam masuk ke SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin. Hal inilah yang menjadikan SDN ini melangkah maju mencoba menjalankan pendidikan yang sedikit berbeda dari sekolah dasar pada umumnya. Dengan berbekal dari suatu keyakinan, kemanusiaan, hak mendapat pendidikan dan pengetahuan yang minim, maka sekolah ini menyatakan sebagai sekolah dasar inklusif. Siswa yang memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula dari anak pada umumnya.

Dengan kata lain, SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin merupakan salah satu sekolah inklusif di Kota Banjarmasin yang kini sebagian dari siswanya adalah anak-anak yang mempunyai kelainan atau ABK. Dengan demikian, SDN Benua Anyar 8 mempunyai tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan Sekolah Dasar yang lain. Karena selain harus mendidik para siswanya yang normal juga harus mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK).

SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin yang merupakan sekolah dasar inklusif dengan status Negeri dan Terakreditasi B. Sekolah ini mengharapkan akan menjadi sekolah inklusif yang terus maju menjadi lebih baik lagi. Sekolah ini memiliki 8 orang guru PNS dan 22 orang guru honorer. Sekolah dasar ini pertama kali menerima siswa ABK di tahun 2003 dengan 1 orang siswa dan mulai

berdiri mempublikasikan diri menjadi sekolah dasar inklusif sejak tahun 2005 hingga sekarang

Suasana di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin dapat tergambar sebagai berikut:

Siswa-siswa datang ke sekolah pada jam 07. 30 dengan diantar oleh orangtua, sebelum jam pelajaran berlangsung siswa-siswi sebagian bermain di lapangan sekolah termasuk siswa ABK, ada perselisihan kecil diantara siswa ABK dengan siswa normal tetapi tidak mengarah kepada hal-hal yang lebih serius. Penderita tuna daksa yang menggunakan kursi roda dibantu oleh temannya dalam beraktivitas disekolah, adanya interaksi yang baik diantara keduanya, sedangkan siswa tuna rungu kesulitan dengan komunikasi karena siswa-siswi normal tidak bisa menggunakan bahasa yang dia mengerti. Disinilah terlihat adanya perbedaan yang mendasar pada setiap siswa ABK yang ada di sekolah ini.

Pemaparan di atas menggambarkan bahwa terlihat adanya perbedaan pada setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka karena mereka memiliki hak yang sama dalam proses pembelajaran, untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa. Bagi mereka yang memiliki ketidak mampuan khusus atau memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi dan tepat. Perbedaan yang terdapat dalam diri individu harus disikapi dalam dunia pendidikan dengan mempersiapkan model pendidikan yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu tersebut. Perbedaan bukan lantas melahirkan diskriminasi dalam pendidikan, namun pendidikan harus tanggap dalam menghadapi perbedaan.

Pengamatan yang dilakukan pada jam pelajaran berlangsung menggambarkan sebelum memulai pelajaran semua siswa dibiasakan untuk

berdoa bersama- sama yang dipimpin oleh satu orang siswa. Setiap guru kelas memiliki guru pendamping, guru pendamping dikhususkan untuk membantu guru kelas dalam menangani siswa ABK. 4 orang siswa ABK memiliki satu orang guru pendamping. guru pendamping diambil dari guru honor, setiap guru pendamping dikuliahkan kembali di Fakultas Luar Biasa (FLB) sehingga memiliki keahlian khusus dalam menangani siswa ABK. Di dalam kelas pada barisan paling depan diprioritaskan untuk siswa ABK, jika ada kerja kelompok siswa ABK berada ditengah ruangan kelas, penempatan duduk seperti ini lebih memudahkan guru dalam proses pembelajaran, Di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin ini tidak ada kelas khusus untuk ABK, mereka belajar bersama-sama dengan siswa normal lainnya. Walaupun demikian, siswa yang normal tidak merasa terganggu dengan kehadiran siswa ABK, Dalam 10 menit pelajaran berlangsung setiap siswa terlihat fokus dalam pembelajaran , tetapi beberapa menit kemudian siswa ABK mulai tidak fokus, misalnya saja siswa penderita tunalaras tipe ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktif) mulai mengganggu siswa lain sehingga sesekali terjadi perkelahian kecil ini dikarenakan labilnya psikologi siswa ABK, untuk menangani siswa tunalaras seperti itu, guru pendamping sudah memiliki keahlian dalam memahami, melakukan assesment,dan mengelola gangguan emosi dan perilaku. Di sekolah ini mengadakan bimbingan khusus setelah pulang sekolah, itu hanya dikhususkan untuk kelas 1 dan kelas 2 saja, untuk kelas 3 sampai dengan 6 tidak dilaksanakan karena tidak cukupnya waktu yang tersedia, walaupun demikian siswa ABK tetap melakukan terapi diluar jam sekolah.

Pengamatan di atas menggambarkan beberapa hal tentang sekolah inklusif diantaranya, pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Demikian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusif menyamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Untuk itulah, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru harus memiliki kemampuan dalam menghadapi banyaknya perbedaan peserta didik. Pada sekolah inklusif setiap 4 orang siswa ABK memiliki satu orang guru pendamping, penempatan posisi duduk yang lebih mengutamakan siswa ABK, dan adanya bimbingan khusus

untuk siswa ABK kelas 1 dan kelas 2. Oleh karena itu pembelajaran sekolah inklusif relatif berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Pengelolaan Pembelajaran Sekolah Inklusif di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin*.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah pengelolaan pembelajaran pada sekolah inklusif, yang selanjutnya dirinci menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan, pembelajaran pada sekolah inklusif di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin?
2. Bagaimana pelaksanaan, pembelajaran pada sekolah inklusif di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin?
3. Bagaimana evaluasi, pembelajaran pada sekolah inklusif di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran pada sekolah inklusif di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang peneliti garap ini, diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas

manajemen pembelajaran atau pendidikan. Sehingga dapat mengetahui dengan jelas berhasil tidaknya dalam melaksanakan dan mengelola manajemen disekolah. Di samping itu, hasil penelitian ini agar dapat dijadikan suatu perbaikan bila pelaksanaannya masih terdapat kekurangan.

2. Bagi kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidikan dan kependidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan berbagai kebijakan yang terkait dengan manajemen pembelajaran di sekolah ini.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan atau perbandingan bagi peneliti lain yang masalah penelitiannya sejenis.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang erat kaitannya dengan penulisan tesis ini, yaitu:

Pengelolaan pembelajaran yang dimaksud adalah sebagai proses pengelolaan dalam kegiatan belajar mengajar yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk mengorganisir pelaksanaan pembelajaran diperlukan pengelolaan pembelajaran dengan efektif. Pembelajaran yang dikelola dengan manajemen yang efektif diharapkan dapat mengembangkan potensi siswa, sehingga

memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang mengakar pada individu siswa.

Inklusif berasal dari Bahasa Inggris “inclusive” yang artinya “termasuk di dalamnya”<sup>15</sup>. Secara istilah berarti menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain/ kelompok lain dalam melihat dunia, dengan kata lain berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah.<sup>16</sup>

Pengelolaan pembelajaran inklusif adalah proses pengelolaan di sekolah dalam konteks pembelajaran yang memfokuskan pada pengetahuan dan kemampuan guru dalam perencanaan, pelaksanaan serta dalam evaluasi pembelajaran secara efektif untuk mencapai sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan reguler secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian yang terdahulu yang relevan untuk perbandingan penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian yang pertama Manajemen Pembelajaran pada Sekolah Inklusif di SD Negeri Blotongan 03 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen pembelajaran pada sekolah inklusif di SD Negeri Blotongan 03 belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini

---

<sup>15</sup> Risa Agustin, S.Pd, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Serba Jaya, 2013) h. 183

<sup>16</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, h. 83

disebabkan karena pelaksanaan pembelajaran inklusif di SD Negeri Blotongan 03 mengalami beberapa kendala antara lain kurangnya Guru Pembimbing Khusus (GPK), minimnya sosialisasi manajemen pembelajaran dari Dinas kepada pihak sekolah, serta kurangnya kerjasama yang terjalin antara pihak sekolah dan SLB.

Penelitian yang kedua yaitu Manajemen Program Pendidikan Inklusif Kota Surakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Manajemen Program Pendidikan Inklusif Di Kota Surakarta) dari hasil penelitian diperoleh bahwa perencanaan dalam program pendidikan inklusif meliputi : penentuan kriteria sekolah, penyiapan sumber daya manusia, penyesuaian kurikulum, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Disdikpora dan, perencanaan penerimaan siswa baru, serta perencanaan pembelajaran yang dilakukan pihak sekolah. Pengorganisasian dilakukan oleh setiap bidang pendidikan sekolah, baik Sekolah Dasar dan PAUD, SMP maupun SMA dalam Disdikpora. Setiap bidang ini secara langsung membawahi sekolah penyelenggara program inklusif. Koordinasi dalam program pendidikan inklusif bersifat vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal terlihat dari adanya koordinasi sekolah penyelenggara program inklusif dengan Disdikpora kota Surakarta, koordinasi sekolah penyelenggara program inklusif dengan Diknas Jawa Tengah, koordinasi sekolah penyelenggara program inklusif dengan Ditjend PLB, koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga kota Surakarta dengan Dinas Pendidikan Jawa Tengah, koordinasi dengan Pendidikan Luar Biasa. Koordinasi horizontal terlihat dari : koordinasi antara bidang pendidikan sekolah dalam Disdikpora kota

Surakarta, koordinasi antara guru pendamping khusus dengan guru lainnya dalam sekolah penyelenggara program inklusif.

Penelitian yang ketiga yaitu Sari Mulya Ningrum Interaksi Siswa Difabel Dan Non-Difabel Di Sekolah Inklusif MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan sekolah inklusif MAN Maguwoharjo mengacu pada prinsip fleksibilitas, baik pada aspek penempatan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, sistem penilaian dengan tetap merujuk pada standar pendidikan Nasional. Pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Metode mengajar yang dipergunakan oleh guru di MAN Maguwoharjo bervariasi, antara lain dilakukan dengan ceramah, diskusi, tanya jawab maupun presentasi yang melibatkan pihak guru dan siswa maupun salah satu pihak saja. Praktik pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel agar tidak membebani siswa. Pada saat kegiatan belajar mengajar juga menggunakan sistem asuhan sebaya untuk siswa difabel, maksudnya adalah siswa difabel seperti tunanetra akan dibantu oleh teman-teman lainnya saat pembelajaran berlangsung. Terdapat visualisasi terhadap materi pelajaran untuk membantu siswa difabel dalam menerima materi pelajaran di kelas. Interaksi sosial yang tercipta antara siswa difabel dan non-difabel di sekolah inklusif MAN Maguwoharjo lebih banyak pada kerjasama, yaitu siswa non-difabel membantu siswa difabel membacakan materi atau soal latihan yang diberikan guru dan kerjasama dalam kegiatan berdiskusi dan presentasi.

Penelitian yang keempat yaitu Andreas Wato dengan judul Manajemen Hubungan Masyarakat pada Sekolah Inklusif. Studi Multi Kasus pada SMPN 18 dan SMPK Bhakti Luhur Malang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Perencanaan program humas pada sekolah inklusif dimulai dari identifikasi permasalahan. Selanjutnya, dirumuskan tujuan dari program humas tersebut. Tujuan humas pada sekolah inklusif adalah agar masyarakat bisa menerima kehadiran siswa ABK dan pendidikan inklusif, kemudian sekolah mengadakan rapat untuk menentukan strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan. Setelah itu disusunlah program kerja. (2) Pelaksanaan program hubungan masyarakat dalam sekolah inklusif dilakukan dengan menjalin komunikasi dua arah simetris yang baik dan rutin dengan pihak yang berkepentingan dengan mengedepankan sikap yang ramah dan menggunakan berbagai media, membentuk Pokja sekolah inklusif, melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah, memberikan dukungan dan motivasi kepada para praktisi hubungan masyarakat dengan pendekatan moral religius humanis, melakukan koordinasi melalui rapat triwulan. (3) Evaluasi program hubungan masyarakat dalam pendidikan inklusif meliputi aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan manajer inklusif serta koordinator GPK, serta pengawasan non formal oleh orangtua dan semua personil sekolah. Evaluasi dilakukan secara individual nonformal dan formal dalam pleno atau rapat bersama pada tengah dan akhir semester serta akhir tahun ajaran. Salah satu pendekatan penting yang dilakukan dalam mekanisme evaluasi adalah dengan menggunakan pendekatan rohani.

Dari beberapa penelitian yang ada, sebenarnya sudah ada yang melakukan penelitian berkaitan tentang pendidikan inklusif, akan tetapi lebih menekankan pada program pendidikan inklusif itu sendiri, interaksi siswa dan hubungan masyarakat tentang sekolah inklusif, meskipun juga ada penelitian yang berkenaan dengan manajemen pembelajaran sekolah inklusif. Dalam konteks ini, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan dasar yang sama, tetapi dengan lokasi penelitian yang berbeda.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika sekaligus struktur tesis ini tersusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis, terdiri dari pengelolaan pembelajaran, ruang lingkup pengelolaan pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, pendidikan inklusif, pengertian klasifikasi dan karakteristik berdasarkan kecacatan anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan islam, pengelolaan pembelajaran inklusif dan kerangka pemikiran.

Bab III metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV paparan data dan pembahasan terdiri dari gambaran umum SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin, penyajian data tentang peran kepala sekolah dalam pengelolaan pembelajaran pada sekolah inklusif di SDN Benua Anyar 8

Banjarmasin yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran pada sekolah inklusif. Pembahasan meliputi kurikulum yang fleksibel, pendekatan, strategi dan metode untuk siswa ABK dan evaluasi pembelajaran yang berkelanjutan.

Bab V Penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran.